



UNIVERSITAS INDONESIA

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN
DOHA DEVELOPMENT AGENDA – WTO
STUDI KASUS: LIBERALISASI SEKTOR PERTANIAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

**MUHAMMAD NAFAN AJI GUSTA UTAMA
0806438654**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
DESEMBER, 2010**



“Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.”

(Al Qur'an, Surat An Nuur: 52)



Persembahan :

untuk Ayah, Ibu, dan
Adik-adikku tercinta


HALAMAN PENGESAHAN

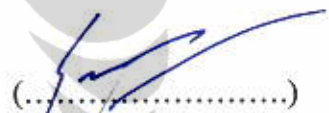
Tesis ini diajukan oleh :


Nama : Muhammad Nafan Aji Gusta Utama
NPM : 0806438654
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Diplomasi Indonesia dalam Perundingan Doha Development Agenda – WTO; Studi Kasus: Liberalisasi Sektor Pertanian


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Vishnu Juwono, S.E., MIA 
(.....*Vishnu Juwono*.....)

Penguji Ahli : Dr. Syamsul Hadi 
(.....)

Ketua Sidang : Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D 
(.....)

Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, M.A. 
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Desember 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Nafan Aji Gusta Utama

NPM : 0806438654

Tanda Tangan :



Tanggal : 22 Desember 2010



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nafan Aji Gusta Utama
NPM : 0806438654
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Diplomasi Indonesia dalam Perundingan Doha Development Agenda –
WTO; Studi Kasus: Liberalisasi Sektor Pertanian**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2010
Yang menyatakan,



(Muhammad Nafan Aji Gusta Utama)

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah memberi kekuatan dan petunjuknya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis yang berjudul “Diplomasi Indonesia dalam Perundingan *Doha Development Agenda - WTO*. Studi Kasus: Liberalisasi Sektor Pertanian.”

Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat magister pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Dalam menulis sebuah tesis dituntut adanya suatu kebenaran dan obyektifitas. Bidang studi Ilmu Hubungan Internasional adalah termasuk kelompok ilmu sosial. Dibandingkan dengan kelompok ilmu eksakta, kelompok ilmu sosial lebih sulit dalam mengukur kebenarannya. Sebab sasaran studinya bisa berubah-ubah.

Pokok masalah yang dibahas dalam karya tulis ini menyangkut diplomasi Indonesia melalui G-33 dalam perundingan Putaran Doha khususnya di sektor pertanian. Penulis tertarik untuk menulis tesis ini sebab hal ini berdasarkan keingintahuan penulis mengenai negosiasi WTO di bidang pertanian selalu menarik perhatian dunia sebab isu-isu yang dibahas tergolong cukup sensitif dimana negara maju dan negara berkembang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, perjuangan dalam perundingan *Doha Development Agenda - WTO* khususnya di sektor pertanian cenderung penuh dengan gejolak dan diwarnai dengan pengelompokkan-pengelompokkan, khususnya negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Indonesia memperjuangkan konsep *Special Product (SP)* dan *Special Safeguard Mechanism (SSM)* dengan membentuk G-33 yang bertujuan untuk melindungi kehidupan petani (*livelihood security*), ketahanan pangan (*food security*) dan pembangunan pedesaan (*rural development*).

Penulis mendapat kesulitan dalam memperoleh literatur-literatur yang khusus membahas soal ini karena masalahnya sudah lama terjadi namun belum

diketahui publik. Setelah melalui beberapa hambatan, penulis merasa mendapat jalan untuk menyusun buah karya ini.

Atas selesainya tesis ini penulis dengan tulus hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Vishnu Juwono, S.E., MIA yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam penulisan tesis ini. Penulis menganggap beliau begitu tulus dan ikhlas membimbing dan memperbaiki berbagai kekurangan penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 2) Bapak Dr. Syamsul Hadi selaku dosen penguji yang dengan murah hati telah memberi berbagai masukan dalam menyempurnakan buah karya ini;
- 3) Bapak Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D selaku ketua sidang yang telah memberikan bimbingan sejak penulis menginjak tahun pertama belajar di Perguruan Tinggi;
- 4) Ibu Asra Virgianita, M.A. selaku sekretaris sidang yang telah memberikan masukan yang berarti dalam tesis ini;
- 5) pihak Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HAKI Kementerian Luar Negeri (mba Fenny, mas Effendi, pak Suwanto, dll.) atas bantuan dokumen dan sarannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
- 6) pihak Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (Ditjen KPI) dan Perpustakaan WTO Kementerian Perdagangan (pak Hironimus, mba Ida, dll.) atas bantuan dokumen kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
- 7) Direktur Eksekutif *Institute for Global Justice*, Indah Suksmaningsih beserta para staf (mas Herjuno, dll.) atas bantuannya dalam memberikan berbagai informasi dari sudut pandang LSM;
- 8) pihak Dosen FISIP HI Program Pascasarjana (pak Makmur, mba Riris, pak Hariyadi, pak Fredy, pak Andi, mas Tirta, mba Yunie, mas Ali, pak Bantarto, pak Luhumina, dll.) yang telah memberikan bimbingan sejak penulis menginjak tahun pertama belajar di Perguruan Tinggi;
- 9) pihak Sekretariat FISIP HI Program Pascasarjana (mba Ice, mba Lina, bang Udin, mas Adi, dll.) yang telah memberikan kemudahan administrasi sejak penulis menginjak tahun pertama belajar di Perguruan Tinggi.

10) rekan-rekan Angkatan 16 (Yossie, Zein, Nada, Uus, Romi, Adit, Frank, Haka, Cyntia, Sarah, Nita, Hana, ibu Mona, mba Yoan, dkk.), Angkatan 17 (Akkar, Ari, Azi, Seno, mba Nova, Nita, Stella, Corryn, Jessica, Kristina, dkk.), serta Angkatan 18 (Dudy, Boy, Putra, Alwi, Lukman, Andri, Sabriana, Haura, Fanny, dkk.) atas berbagai *support* yang diberikan selama penulis belajar di Perguruan Tinggi.

Akhir kata, semoga tulisan ini berguna bagi penulis pribadi dan juga masyarakat luas. Amin.

Jakarta, 23 Desember 2010

Penulis



ABSTRAK

Nama : Muhammad Nafan Aji Gusta Utama
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Diplomasi Indonesia dalam Perundingan Doha Development Agenda – WTO; Studi Kasus: Liberalisasi Sektor Pertanian

Dalam mewujudkan suatu sistem perdagangan yang bebas dan adil dalam kerangka kerjasama multilateral yang lebih konkrit diwujudkan melalui pembentukan organisasi perdagangan dunia atau yang lebih dikenal dengan WTO. Persetujuan Bidang Pertanian dalam WTO bertujuan untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar, adil dan lebih dapat diprediksi. Liberalisasi di bidang pertanian yang merupakan *mandated agenda* dan dilakukan melalui serangkaian perundingan multilateral serta tertuang dalam Persetujuan Bidang Pertanian menuntut Indonesia sebagai negara anggota WTO untuk mematuhi. Idealnya diharapkan dengan adanya aturan tersebut berbagai hambatan di sektor pertanian seperti hambatan tarif dan non-tarif, serta penerapan berbagai bentuk subsidi yang menyebabkan distorsi perdagangan dapat dikurangi atau dihapus. Namun pada kenyataannya hal ini masih sulit dilakukan sebab masih banyaknya anggota WTO khususnya negara-negara maju yang masih memberlakukan kebijakan proteksi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut kesepakatan yang tertuang dalam perundingan *Doha Development Agenda – WTO* di bidang pertanian awalnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang karena dalam agenda Doha termaktub komitmen negara maju untuk mengurangi berbagai subsidi dan menghapus restriksi impor yang diberlakukan terhadap produk-produk pertanian negara berkembang namun hal tersebut tetap tidak efektif dalam realisasi pelaksanaannya. Oleh sebab itu, perjuangan dalam perundingan sektor pertanian di WTO cenderung penuh dengan gejolak dan diwarnai dengan pengelompokan-pengelompokan, khususnya negara-negara berkembang.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perspektif nasionalis/realis (merkantilis) dari Robert Gilpin. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional dari Charles O. Lerche yang menyebutkan bahwa tindakan suatu negara yang diwujudkan dalam politik luar negerinya selalu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang berasal dari penerapan kepentingan nasional di mana politik luar negeri tersebut dibuat. Lebih lanjut Norman J. Padelford menegaskan bahwa kepentingan nasional suatu negara harus menjadi vital terhadap *national independence, way of life, territorial security, and economic welfare*. Sementara itu, untuk menganalisa bagaimana perundingan berlangsung dan mekanisme diplomasi dalam perundingan WTO penulis menggunakan teori negosiasi dari Fred Charles Iklé dan Bernard M. Hoekman.

Adapun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah data-data primer dan sekunder.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembentukan Kelompok G-33 yang dikoordinasi Indonesia dimaksudkan guna memperkuat *bargaining position* dalam memperjuangkan konsep SP (*Special Product*) dan SSM (*Special Safeguard Mechanism*). Hal ini amat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia karena sektor pertanian terkait dengan ketahanan pangan (*food security*), jaminan penghidupan (*livelihood security*) dan pembangunan pedesaan (*rural development*). Namun dalam perundingan Putaran Doha khususnya sektor pertanian cenderung penuh gejolak sebab isu-isu yang dibahas tergolong cukup sensitif dimana negara maju dan negara berkembang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda.

Untuk perundingan Putaran Doha lebih lanjut, Indonesia melalui G-33 beserta kelompok-kelompok negara berkembang lainnya harus semakin bersatu menghadapi dominasi negara-negara maju dalam perundingan WTO, sebab hal ini dapat mempengaruhi hasil-hasil perundingan Putaran Doha berikutnya. Selain itu, diharapkan agar delegasi Indonesia tidak kehilangan arah dalam memperjuangkan kepentingannya agar tidak menjadi negara korban agenda neoliberal negara-negara maju dalam WTO.

Kata kunci:

Politik Luar Negeri, Diplomasi, Perdagangan Multilateral

ABSTRACT

Name : Muhammad Nafan Aji Gusta Utama
Study Program : International Relations Post-Graduate
Title : Indonesia's Diplomacy in the Doha Development Agenda –
WTO; Case Study: Liberalization on Agriculture

To promote a free and fair trade system within the framework of multilateral cooperation, the establishment of World Trade Organization (WTO) must be realized. The WTO Agreement on Agriculture Approval aims to reform trade in the agricultural sector and to create more market-oriented, equitable and predictable policies. The liberalization in agriculture which is a mandated agenda and carried through a series of multilateral negotiations as well as stipulated in the Agreement on Agriculture requires Indonesia as a WTO member to comply. Ideally, such a rule is expected by various types of barriers in the agricultural sector such as tariff and non-tariff barriers, as well as the application of various forms of trade distorting subsidies must be eliminated. But in reality, it is still difficult to apply because there were so many WTO members, particularly developed countries that still impose the policy of protection.

In connection with this agreement as stipulated in the Doha Development Agenda - WTO in the agricultural sector was originally expected to bridge the gap between the developed and developing countries because of the commitment embodied in the Doha agenda which emphasizes that the developed countries must reduce subsidies and remove import restrictions applicable to the agricultural products of developing countries but it is still not effective in the realization of its implementation. Therefore, the negotiations in the agricultural sector in the WTO is likely filled with so many problems and there are also the possibilities for coalition or group formation which are taken into account, especially the developing countries.

A framework used in this research is utilizing a nationalist/realist (mercantilist) perspective from Robert Gilpin. The theory used in this research is the theory of national interest from Charles O. Lerche who mentioned that “an objective flows from the application of national interest to the generalized situation in which policy is being made.” Furthermore, Norman J. Padelford asserted that “the national interest of a country is what its governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security, and economic welfare.” Meanwhile, to analyze how the negotiations progress and the mechanism of diplomacy in the WTO negotiations, the author uses the theory of negotiation from Fred Charles Iklé and Bernard M. Hoekman.

This research is based on qualitative research with analytical descriptive research. The data were collected from primary and secondary data.

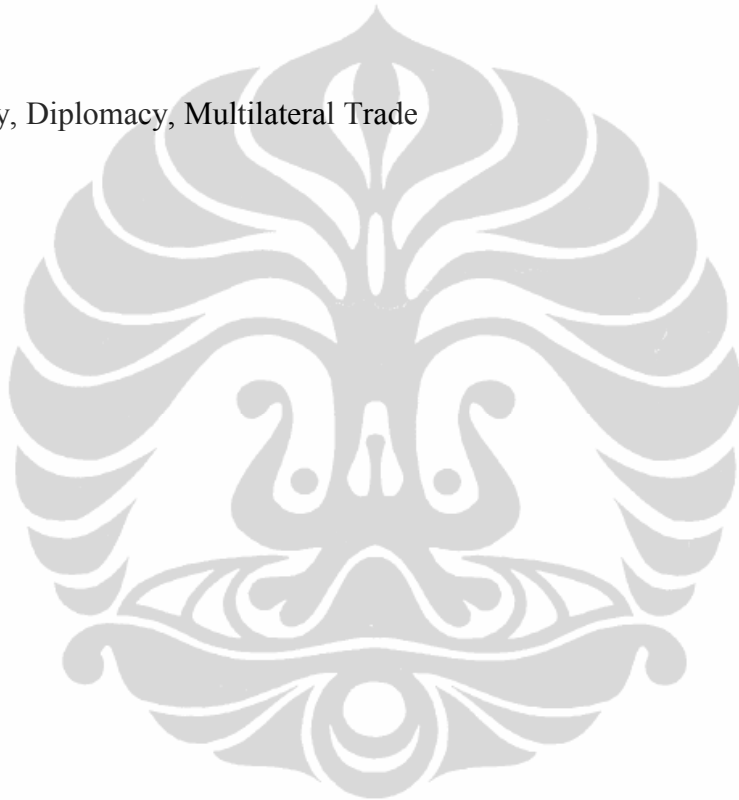
The result obtained from this research is the formation of G-33 coordinated by Indonesia, which is intended to strengthen the bargaining position in defending the position for the concept of SP (Special Products) and SSM (Special Safeguard Mechanism). It is very important for developing countries

especially Indonesia because the agricultural sector is related to food security, livelihood security and rural development. But in the Doha Round negotiations, particularly the agricultural sector tends to cause turbulent issues during the discussions which is quite sensitive because every country especially the developed and developing countries have different interests.

In the next negotiations of the Doha Round, Indonesia through G-33 and other developing nations must unite against the dominance of developed and major countries in WTO negotiations, because this can affect the results of the Doha Round negotiations next. In addition, the Indonesian delegation is expected to defend for their interests, not to become the victims of the neoliberal agenda in the WTO.

Keywords:

Foreign Policy, Diplomacy, Multilateral Trade



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
HALAMAN ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kerangka Pemikiran	10
1.4.1 Tinjauan Pustaka	10
1.4.2 Kerangka Teori	15
1.5 Hubungan Antar Variabel	22
1.6 Model Analisis	24
1.7 Asumsi	24
1.8 Hipotesa	24
1.9 Metode Penelitian	25
1.9.1 Tipe Penelitian dan Metode Analisa Data	25
1.9.2 Teknik Pengumpulan Data	25
1.9.3 Tingkat Analisis	26
1.9.3 Pembatasan Ruang Lingkup dan Waktu	26

1.10	Sistematika Penulisan	26
BAB II.	PERSETUJUAN BIDANG PERTANIAN WTO DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK G-33	28
2.1	Persetujuan Bidang Pertanian WTO	28
2.2	Pilar Persetujuan Bidang Pertanian WTO.....	30
2.2.1	Akses Pasar	30
2.2.2	Dukungan Domestik	31
2.2.3	Subsidi Ekspor	34
2.3	Perjanjian Lain yang Terkait Persetujuan Bidang Pertanian WTO	36
2.3.1	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)</i>	36
2.3.2	<i>Sanitary and Phytosanitary Measures</i>	36
2.3.3	<i>Technical Barriers to Trade (TBT)</i>	37
2.4	Kepentingan Indonesia dalam Persetujuan Bidang Pertanian WTO	38
2.5	Komitmen Indonesia dalam Liberalisasi Pertanian	39
2.6	Pembentukan Kelompok G-33	44
BAB III.	HAKIKAT PERUNDINGAN PERTANIAN DI WTO	53
3.1	Perdagangan Bebas WTO	53
3.1.1	Sekilas WTO	53
3.1.2	Struktur Organisasi WTO	56
3.1.3	Prinsip-prinsip Perdagangan dalam WTO	57
3.1.4	Keuntungan Sistem Perdagangan Bebas WTO	61
3.2	Kelompok-kelompok dalam Negosiasi WTO di Bidang Pertanian.....	63
3.2.1	Amerika Serikat	64
3.2.2	Uni Eropa	65
3.2.3	Kelompok G-20	67
3.2.4	Kelompok G-10	69

3.2.5	<i>Cairns Group</i>	70
3.2.6	Kelompok G-90	73
BAB IV. DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERUNDINGAN		
	DOHA DEVELOPMENT AGENDA - WTO	76
4.1	Konferensi Tingkat Menteri IV WTO di Doha	76
4.2	Draft Teks Harbinson	81
4.3	Konferensi Tingkat Menteri V WTO di Cancún	84
4.4	Pertemuan G-33 Pasca Cancún	87
4.5	Kesepakatan Juli 2004	90
4.6	<i>G-33 Ministerial Communiqué 2005</i>	93
4.7	Konferensi Tingkat Menteri VI WTO di Hong Kong	95
4.8	<i>G-33 Ministerial Communiqué 2007</i>	99
4.9	<i>Mini Ministerial Meeting</i> , Jenewa, Juli 2008	102
4.10	Proposal G-33 Tentang Perlakuan SSM terhadap SVEs	105
4.11	<i>G-33 Ministerial Communiqué 2009</i>	107
4.12	Konferensi Tingkat Menteri VII WTO di Jenewa	109
4.13	Perkembangan FTA Pasca-Kebuntuan Perundingan Putaran Doha – WTO	112
BAB V. KESIMPULAN		
		119
DAFTAR PUSTAKA		
		125

DAFTAR LAMPIRAN

- A. AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION
- B. AGREEMENT ON AGRICULTURE
- C. G-33 PROPOSAL ON SPECIAL PRODUCTS
- D. G-33 PROPOSAL ON SPECIAL SAFEGUARD MESURES



DAFTAR SINGKATAN



ACP	<i>African, Caribbean and Pacific Countries</i>
AFTA	<i>ASEAN Free Trade Area</i>
AMS	<i>Aggregate Measurement of Support.</i>
AoA	<i>Agreement on Agriculture</i>
APEC	<i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
AS/USA	<i>Amerika Serikat/United States of America</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations</i>
BIS	<i>Bank for International Settlement</i>
CAP	<i>Common Agricultural Policy</i>
CoA	<i>Committee on Agriculture.</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FTA	<i>Free Trade Area/Free Trade Agreement.</i>
GATS	<i>General Agreement on Trade in Services</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
HAKI	Hak Atas Kekayaan Intelektual
HODs	<i>Head of Delegations</i>
HS	<i>Harmonized System.</i>
ICA	<i>International Cooperative Alliance</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
KTM	Konferensi Tingkat Menteri.



LDCs	<i>Least Development Countries</i>
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i>
MFN	<i>Most Favoured Nation</i>
MPC	<i>Marginal Propensity to Consume</i>
NAFTA	<i>North America Free Trade Area</i>
NAMA	<i>Non-agricultural Market Access</i>
NTP	Nilai Tukar Petani
PBB/UN	Perserikatan Bangsa-Bangsa/ <i>United Nations</i>
PTRI	Perwakilan Tetap Republik Indonesia
RI	Republik Indonesia
RTA	<i>Regional Trade Agreement</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SDT	<i>Special and Differential Treatment</i>
SOM	<i>Senior Official Meeting</i>
SP	<i>Special Product</i>
SPS	<i>Sanitary and Phytosanitary</i>
SSG	<i>Special Safeguard</i>
SSM	<i>Special Safeguard Mechanism</i>
STEs	<i>State Trading Enterprises</i>
SVEs	<i>Small and Vulnerable Economies</i>
TBT	<i>Technical Barriers to Trade</i>
TNC	<i>Trade Negotiation Committee</i>
TRIPs	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TRQ	<i>Tariff Rate Quota</i>

UE/EU	Uni Eropa/ <i>European Union</i>
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
WHO	<i>World Health Organization</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>



DAFTAR TABEL/GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1: Kerangka Koordinasi Tim Diplomasi Ekonomi	19
Tabel 2.1: Subsidi Domestik dalam Sektor Pertanian	32
Tabel 2.2: Sasaran Pemotongan Subsidi dan Proteksi Berdasarkan Angka-angka	35
Tabel 2.3: Tarif Diikat (<i>Bound Tariff</i>) dan Tarif yang Dipakai (<i>Applied Tariff</i>) untuk Beberapa Komoditi	41
Tabel 3.1: Matriks Kelompok Negara dan Isu Pertanian yang Diperjuangkan ...	75
Tabel 4.1: Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTA) yang sudah dan akan disepakati oleh Indonesia	115

